

# DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI GRAY ZONE OPERATION CHINA COAST GUARD

Oleh: Lucky Marcelino

Pembimbing: Tuah Kalti Takwa, S.H. M.H.

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRAK

Pada Agustus 2023, Pemerintah Cina merilis *2023 Standard Map* yang mengklaim sepihak sebagian besar wilayah Laut Natuna Utara, sehingga menimbulkan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia dan memicu eskalasi konflik baru. Klaim ini memperkuat strategi *Gray Zone Operation* oleh *China Coast Guard* yang mengancam stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menganalisis respons Indonesia melalui pendekatan *soft power* berbasis diplomasi pertahanan dalam menghadapi ancaman tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teori *Bandwagoning*, tulisan ini mengevaluasi proses diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Cina melalui analisis dokumen resmi, publikasi akademik, dan sumber media kredibel. Hasil penelitian ini menunjukkan Diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Cina di Laut Natuna Utara menekankan pendekatan *soft power* melalui kerja sama bilateral berbasis Defence Cooperation Agreement (DCA) 2007, yang mencakup pertukaran perwira, latihan militer non-tradisional, dan pertukaran intelijen. Strategi ini membangun kepercayaan dan komunikasi krisis melalui forum seperti *Navy to Navy Talk*, meskipun tidak secara langsung merespons taktik *gray zone* oleh *China Coast Guard*. Sebagai strategi adaptif, diplomasi ini perlu diperkuat dengan kebijakan maritim yang lebih responsif terhadap ancaman non-konvensional.

**Kata Kunci:** *Soft Power*, Diplomasi Pertahanan, *Grey Zone Operation*, *China Coast Guard*, Zona Ekonomi Eksklusif.

## ABSTRACT

*In August 2023, the Chinese government released its 2023 Standard Map, which unilaterally claims a significant portion of the North Natuna Sea. This claim overlaps with Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) and has triggered a renewed escalation of maritime tensions. It also reinforces China's Gray Zone Operations strategy, particularly through the China Coast Guard, thereby posing a threat to regional stability in Southeast Asia. This study analyzes Indonesia's response using a soft power approach rooted in defense diplomacy to address the emerging threat. Employing a qualitative method and drawing on the theory of bandwagoning, the paper evaluates Indonesia's defense diplomacy towards China through analysis of official documents, academic publications, and credible media sources. The findings indicate that Indonesia's defense diplomacy in the North Natuna Sea emphasizes soft power mechanisms through bilateral*

cooperation under the 2007 Defence Cooperation Agreement (DCA), which includes officer exchanges, non-traditional military exercises, and intelligence sharing. This strategy has helped foster trust and crisis communication, particularly through forums such as Navy-to-Navy Talks. However, it has not directly addressed the gray zone tactics employed by the China Coast Guard. As an adaptive strategy, Indonesia's soft power diplomacy requires reinforcement through a more responsive maritime policy to effectively counter non-conventional security threats.

**Keywords:** Soft Power, Defence Diplomacy, Grey Zone Operation, China Coast Guard, Exclusive Economic Zone

## PENDAHULUAN

Laut Natuna Utara (LNU) secara langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Hegemoni Amerika Serikat dan Cina di kawasan asia tenggara berpotensi tinggi menimbulkan konflik baru dan meningkatkan eskalasi ancaman di wilayah tersebut.<sup>1</sup> Posisi yang strategis dan potensi sumber daya alam yang melimpah, menjadikan Laut Natuna Utara menjadi wilayah yang sering terjadi ketegangan antara Indonesia dengan negara-negara sekitar yang mencoba menerobos masuk ke wilayah Indonesia.

Pada Maret 2016, terjadi ketegangan antara Indonesia dengan Cina. Kapal penjaga pantai Cina (*China Coast Guard*) melakukan manuver penghadangan terhadap kapal milik Indonesia yang akan menangkap kapal penangkap ikan ilegal berbendera Cina.<sup>2</sup> Ketegangan antara Indonesia dan Cina di wilayah

Laut Cina Selatan dalam kurun 2013-2020 sering kali tidak hanya melibatkan kapal-kapal nelayan melainkan kapal CCG juga sering terlibat melakukan pelanggaran di wilayah LNU.<sup>3</sup>

Klaim Cina terhadap Laut natuna Utara didasari pada klaim historis dengan argumen *traditional fishing zone*. *Nine dash Line* menggambarkan sembilan garis putus-putus berbentuk U atau sering disebut sebagai garis lidah sapi yang menggambarkan batas wilayah hak-hak Cina.<sup>4</sup> *Nine dash line* menjadi dasar acuan bagi Cina dalam melakukan aktivitas maritim seperti penangkapan ikan, pelayaran, pemetaan untuk navigasi serta riset kelautan di wilayah tersebut.

---

<sup>1</sup> Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara and Adis Imam Munandar, "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara," *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (2021): 83–101, <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>.

<sup>2</sup> Dkk Rizal Dwi Novianto, "PENYELESAIAN SENGGKETA DI LAUT NATUNA UTARA Rizal Dwi Novianto," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3, no. Nomor 1 (2020): Hal 69-78.

---

<sup>3</sup> Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, and Marina Ika Sari, "Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration [Respons Indonesia Di Tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan Di Bawah Pemerintahan Jokowi]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 12, no. 1 (2021): 85–103, <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>.

<sup>4</sup> Ding Hongbin and Ihsan Ullah, "The South China Sea'S Nine Dash Line: Key Disputes and China'S Historical Rights Claims," *Journal of Pakistan-China Studies (JPCS)* 3, no. 1 (2022): 67–86, <https://doi.org/10.55733/jpcs.v3i1.53>.

Pada Agustus 2023, Pemerintah Cina kemudian merilis 2023 *Standard Map* yang mengakuisisi sebagian besar wilayah Laut Natuna Utara. Pada awalnya area itu dibatasi oleh sembilan garis putus-putus atau *Nine dash Line*, sekarang meluas menjadi *Ten Dash Line*. Tumpang tindih antara ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia dengan 2023 *Standard map* Cina menimbulkan eskalasi konflik baru antara Indonesia dengan Cina. Peta yang baru dirilis oleh Pemerintah Cina ini, sangat berbeda dengan versi peta yang diserahkan kepada PBB pada 2009 tentang Laut Cina Selatan.

Menurut Badan Nasional Perbatasan Republik Indonesia, *Ten Dash Line* melingkar sejauh 1500 km di selatan pulau Hainan dan memotong Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia di wilayah Sabah Sarawak, Brunai, Filipina, Vietnam hingga perairan Indonesia. Peta ini juga mencakup wilayah sengketa termasuk wilayah Taiwan dan wilayah perbatasan India di sepanjang Himalaya, seperti Arunachal Pradesh dan Aksai Chin.<sup>5</sup> Klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina terhadap wilayah ini menimbulkan reaksi keras dari negara-negara di kawasan tersebut termasuk Indonesia, karena penarikan garis wilayah *Ten Dash Line* ini tidak sesuai dengan hukum laut internasional yang diatur dalam konvensi PBB tentang UNCLOS 1982 pasal 47 tentang garis pangkal

kepulauan yaitu penarikan garis dari kepulauan natuna ke arah utara sejauh 200 mil laut sehingga perairan tersebut masuk kedalam ZEE Indonesia.<sup>6</sup>

Bagi Indonesia, *Ten Dash Line* dapat mengancam wilayah teritorial Indonesia di Laut Natuna Utara. *Ten Dash Line* bersinggungan langsung dengan wilayah Laut Natuna Utara sehingga menjadi sangat riskan terjadi tumpang tindih wilayah di perairan tersebut. Batas wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara mencakup sebagian besar area selatan dari wilayah Laut Cina Selatan sehingga posisi Indonesia saat ini menjadi rentan terjadinya eskalasi konflik dengan Cina. Berikut merupakan perbandingan peta batas wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara dengan 2023 *Standard Map China*.

Indonesia dihadapkan dengan ancaman dari strategi *Gray Zone Operation China Coast Guard* yang berlandaskan pada peta standar 2023. Dari strategi *Gray Zone Operation China Coast Guard* berdampak signifikan bagi stabilitas keamanan regional di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara yang terdampak dari *Gray Zone Operation China Coast Guard* seperti Vietnam, Taiwan dan Filipina merasa terancam dengan tindakan agresif yang dilakukan oleh Cina.<sup>7</sup> Kondisi ini mengakibatkan

---

<sup>5</sup> Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, "Klaim Peta Baru China Tabrak Batas Sejumlah Negara, Kedaulatan Indonesia Terancam?," 2023, <https://bnpp.go.id/berita/klaim-peta-baru-china-tabrak-batas-sejumlah-negara-kedaulatan-indonesia-terancam>.

---

<sup>6</sup> Mangisi Simanjuntak, "Menolak Klaim Historis China 'Nine Dash Line' Dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan Serta Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 150–62, <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.466>.

<sup>7</sup> Eric Chan et al., "What US Air Force Re-Optimization Means for Taiwan At the 2024 'Two Sessions' in Beijing, China Talks

terjadinya perubahan dalam dinamika keamanan regional bagi negara-negara yang berada di kawasan Laut Cina Selatan. Peningkatan anggaran pertahanan dan penguatan aliansi militer dengan Amerika Serikat diperlukan untuk menghadapi situasi ini. Situasi ini berpotensi untuk meningkatkan terjadinya ketegangan dalam stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan dan berpengaruh dalam hubungan diplomasi dengan Cina.

#### **A. METODE PENELITIAN**

Metode penulisan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Penulisan kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>8</sup> Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi pustaka. Studi pustaka menggunakan data yang terdapat dalam buku, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif seperti teks tertulis oleh karena itu, kemudian penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan menempatkan Pemerintah Indonesia sebagai unit analisis untuk menjelaskan secara mendalam mengenai strategi diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia untuk menghadapi ancaman dari *Gray zone operation China Coast Guard*.

---

Tough on Taiwan Decoding Beijing's Gray Zone Tactics: China Coast Guard Activities and the Redefinition of Conflict in the Taiwan Strait The Nexus of Cyb" 9, no. 6 (2024), <http://globaltaiwan.org/sub->

<sup>8</sup> John W. Creswell, *A Concise Introduction to Mixed Methods Research Second Edition*, 2022.

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan *library research* dan, yaitu dengan mengumpulkan data yang berasal dari buku, artikel, berita, jurnal dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkit dan memiliki kredibilitas. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pemerintah Indonesia yang direpresentasikan oleh Kementerian Pertahanan dalam diplomasi pertahanan dan hubungan kerja dengan Kementerian Luar Negeri dalam hal diplomasi. Dengan uang lingkup penelitian dalam rentang waktu 2023 hingga 2024. Infiltrasi CCG di wilayah Laut Natuna Utara dan Kepulauan Spratly dalam rentan waktu tersebut terjadi cukup signifikan. Penerobosan batas wilayah, infiltrasi sering terjadi setelah 2023 *Standard Map China* di rilis.

#### **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Gambaran Umum Tentang Gray Zone Operation China Coast Guard**

Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan merupakan sumber ketegangan geopolitik yang berkelanjutan dan berskala global. Ketegangan ini dipicu oleh tumpang tindih klaim teritorial antara Cina, Taiwan, dan negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Klaim sepihak Cina yang didasarkan pada peta nine dash line tidak hanya menabrak prinsip-prinsip hukum laut internasional, tetapi juga secara langsung memotong wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-

negara di kawasan tersebut.<sup>10</sup> Dalam upaya melegitimasi klaim tersebut, Cina melakukan berbagai manuver non-militer yang bersifat koersif, mulai dari pengerahan kapal nelayan yang dikawal oleh kapal *China Coast Guard* (CCG) hingga pembangunan pulau buatan dan instalasi militer di Kepulauan Spratly dan Paracel sejak 2013.

Strategi yang digunakan oleh Cina dikenal sebagai Gray Zone Operations, yaitu suatu bentuk operasi yang beroperasi di antara kondisi damai dan perang. Taktik ini memanfaatkan tindakan-tindakan yang tidak langsung memicu konflik bersenjata tetapi tetap bertujuan untuk mencapai tujuan strategis melalui cara-cara yang ambigu. Ciri khas dari strategi ini adalah penggunaan kekuatan non-konvensional, seperti penjaga pantai, milisi maritim, dan kapal sipil, untuk menciptakan tekanan terhadap negara lain tanpa melibatkan militer secara terbuka.<sup>11</sup> Dengan demikian, strategi ini sangat efektif dalam menghindari respons militer langsung dari negara sasaran, sekaligus mendorong perubahan status quo di wilayah sengketa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Dwi Waluyo, "Cina Dan Vietnam: Ketiadaan Konflik Terbuka Di Laut Cina Selatan," *Jurnal Dinamika Global* 5, no. 02 (2020): 319–33, <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.203>.

<sup>11</sup> Boy Anugerah, "Penguatan Strategi Penangkalan Dalam Merespons Aksi Koersif Cina Di Laut Natuna Utara," *Jurnal Dinamika Global* 6, no. 02 (2021): 286–307, <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.701>.

<sup>12</sup> TM Kane, *Chinese Grand Strategy and Maritime Power, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/pu>

*China Coast Guard* menjadi aktor utama dalam pelaksanaan strategi ini. Sejak didirikan pada tahun 2013, CCG mengalami transformasi signifikan dari lembaga penegak hukum maritim sipil menjadi kekuatan paramiliter yang beroperasi dengan kapabilitas tinggi.<sup>13</sup> Pemberlakuan Undang-Undang Penjaga Pantai pada 2021 memberi kewenangan kepada CCG untuk menggunakan kekuatan bersenjata terhadap kapal asing yang dianggap melanggar hukum domestik Cina. CCG kini tak hanya bertugas menegakkan hukum perikanan dan mengawasi lingkungan, tetapi juga berfungsi sebagai alat politik dan keamanan luar negeri untuk memperkuat klaim teritorial Cina, termasuk di wilayah-wilayah yang secara hukum berada di bawah yurisdiksi negara lain.<sup>14</sup>

Di Laut Cina Selatan, kehadiran CCG sering kali menimbulkan friksi langsung dengan negara-negara tetangga. Operasi ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur, seperti yang terlihat dalam tahapan infiltrasi di perairan Taiwan pada tahun 2024.<sup>15</sup> Dalam

---

blication/305320484\_SISTEM\_PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELES TARI.

<sup>13</sup> IGB Dharma Agastia, "Centre for Strategic and International Studies Report Part Title : Menghadapi Milisi Maritim Tiongkok Dan Operasi Daerah Abu-Abu ( Grey Zone Operations ) Di Laut Cina Selatan Report Part Author ( s ) : IGB Dharma Agastia Report Title : Sorotan Kebijakan Lu," 2020.

<sup>14</sup> Japanese Ministry of Defense, "The Coast Guard Law of the People's Republic of China," 2020, [https://www.mod.go.jp/en/d\\_act/sec\\_env/ch\\_ocrn/index.html](https://www.mod.go.jp/en/d_act/sec_env/ch_ocrn/index.html).

<sup>15</sup> Chan et al., "What US Air Force Re-Optimization Means for Taiwan At the 2024 'Two Sessions' in Beijing, China Talks

skenario tersebut, CCG memulai operasinya dengan masuk ke wilayah perairan terbatas, kemudian melanjutkan dengan normalisasi kehadiran melalui patroli dan latihan rutin bersama kapal nelayan milisi maritim. Tahap selanjutnya adalah penguatan kontrol atas wilayah sengketa dengan kehadiran yang lebih intens dan luas, hingga akhirnya berujung pada upaya pengambilalihan wilayah melalui infiltrasi permanen. Pendekatan ini mencerminkan taktik jangka panjang Cina untuk membentuk realitas baru di kawasan tanpa memulai perang terbuka.

Implikasi dari strategi ini terhadap stabilitas kawasan sangat serius. Laut Cina Selatan merupakan jalur utama perdagangan dunia dan kawasan yang kaya sumber daya alam seperti ikan, minyak, dan gas alam.<sup>16</sup> Klaim sepihak dan tindakan agresif Cina memicu reaksi keras dari negara-negara ASEAN. Patroli CCG yang sering masuk ke ZEE negara lain, seperti di Laut Natuna Utara, mengganggu nelayan lokal dan merugikan perekonomian nasional. Tidak hanya itu, tindakan-tindakan Cina juga memicu militerisasi di kawasan, dengan beberapa negara seperti Filipina memperkuat aliansi militernya bersama Amerika Serikat untuk mengimbangi dominasi Cina.<sup>17</sup>

---

Tough on Taiwan Decoding Beijing's Gray Zone Tactics: China Coast Guard Activities and the Redefinition of Conflict in the Taiwan Strait The Nexus of Cyb."

<sup>16</sup> Damar Dwi Syahrial, "Diplomacy in Countering Terrorism: An Analysis of Indonesia-Australia Bilateral Consultations on Combating Terrorism," 2024, 477-93.

<sup>17</sup> K M I International Journal and Maritime Affairs, "KMI International Journal of Maritime Affairs and Fisheries" 4, no. 1 (2012).

Insiden-insiden yang terjadi, seperti di Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal, menunjukkan bahwa konflik dapat diciptakan di bawah ambang batas perang secara formal.<sup>18</sup>

Dalam konteks hukum internasional, strategi Gray Zone yang dijalankan Cina menimbulkan dilema besar. Meskipun UNCLOS 1982 telah menetapkan hak dan yurisdiksi negara pantai di laut, Cina menafsirkan ketentuan tersebut secara fleksibel.<sup>19</sup> Konsep nine dash line yang dijadikan dasar klaim Cina telah ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) pada 2016 dalam kasus Filipina versus Cina, namun putusan ini tidak diakui oleh Beijing.<sup>20</sup> Sebaliknya, Cina terus memperluas aktivitas maritimnya dan memberdayakan CCG sebagai kekuatan utama di lapangan, termasuk dalam tindakan yang bersifat militeristik.

Pengesahan UU CCG 2021 semakin memperkeruh situasi karena memberi kewenangan penggunaan kekuatan bersenjata kepada penjaga pantai di wilayah yang diklaim secara sepihak.<sup>21</sup> Hal ini melanggar

---

<sup>18</sup> Stephen Burgess, "Confronting China's Maritime Expansion in the South China Sea A Collective Action Problem," *Journal of Indo-Pacific Affairs*, no. Fall (2020): 112-34.

<sup>19</sup> D Desierto, "China's Maritime Law Enforcement Activities in the South China Sea," *International Law Studies* 96, no. 1 (2020): 269.

<sup>20</sup> Hong Kong To Nguyen, "Law and (Dis) Order in the South China Sea: Analyzing Maritime Law-Enforcement Activities in 2010-22," *Asia Policy* 18, no. 2 (2023): 127-64.

<sup>21</sup> Suk Kyoong Kim, "An International Law Perspective on the China Coast Guard Law and Its Implications for Maritime Security in East Asia," *International Journal of Marine and Coastal Law* 37, no. 2 (2022): 241-55, <https://doi.org/10.1163/15718085-bja10089>.

prinsip-prinsip kebebasan navigasi (Pasal 87 UNCLOS) dan kewajiban penyelesaian damai sengketa (Pasal 279 UNCLOS). Fakta bahwa CCG sering bertindak layaknya angkatan laut, terutama sejak institusi ini ditempatkan di bawah Komisi Militer Pusat Cina pada 2018, memperjelas tujuan militerisasi tersembunyi dari strategi zona abu-abu.

Akibat strategi ini, kawasan Laut Cina Selatan semakin berisiko menjadi ajang konfrontasi regional dan internasional. Perusahaan-perusahaan energi asing menunda eksplorasi karena khawatir terhadap intervensi CCG, sementara negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia memperkuat kekuatan penjaga pantai mereka. Meski ASEAN berupaya menyusun mekanisme Code of Conduct (CoC) untuk menstabilkan kawasan, efektivitasnya masih minim karena lemahnya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat.

*Gray Zone Operations* yang dijalankan oleh *China Coast Guard* menjadi salah satu tantangan utama bagi stabilitas maritim di Asia Tenggara. Strategi ini tidak hanya merusak tatanan hukum laut internasional, tetapi juga menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan ekonomi, kedaulatan wilayah, dan stabilitas politik negara-negara di kawasan. Dalam menghadapi hal ini, ASEAN perlu memperkuat kerja sama keamanan maritim, meningkatkan kapabilitas penegakan hukum, dan mendorong keterlibatan

### **Ancaman Pertahanan Dan Keamanan Yang Timbul Dari *Gray Zone Operations* China Coast Guard**

Aktivitas CCG di Laut Natuna Utara berakar pada klaim sepihak Cina melalui *nine dash line*, yang diperluas menjadi *ten dash line* dalam *Standard Map 2023*. Wilayah ini secara hukum berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menurut UNCLOS 1982, namun Cina secara aktif menempatkan kapal penjaga pantainya dan milisi maritim di kawasan tersebut.<sup>22</sup> Sejumlah insiden sejak 2021 mengindikasikan pola operasi terstruktur dan berulang, seperti infiltrasi kapal CCG 5402 yang mengganggu kegiatan survei eksplorasi milik Pertamina di wilayah landas kontinen Indonesia.<sup>23</sup> Tindakan ini direspons oleh Bakamla dan TNI AL melalui taktik *shadowing*.

Strategi Cina memanfaatkan CCG dan milisi maritim sebagai instrumen paramiliter yang bertindak di bawah ambang konflik bersenjata. Milisi ini beroperasi menggunakan kapal sipil tanpa tanda militer, mempersulit identifikasi dan respons hukum oleh negara sasaran.<sup>24</sup> Operasi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi strategis Indonesia seperti eksplorasi minyak dan gas di

<sup>22</sup> D R Duta, "Pemikiran Kolaboratif Taktis Operasi Dalam Rangka Penguasaan Efektif Zee Di Wilayah Laut Natuna Utara," *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime ...*, 2022, 111–17, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3116966>.

<sup>23</sup> Indonesian Ocean Justice Initiative, "Laporan Deteksi & Analisis Keamanan Laut," 2024.

<sup>24</sup> Agastia, "Centre for Strategic and International Studies Report Part Title : Menghadapi Milisi Maritim Tiongkok Dan Operasi Daerah Abu-Abu ( Grey Zone Operations ) Di Laut Cina Selatan Report Part Author ( s ) : IGB Dharma Agastia Report Title : Sorotan Kebijakan Lu."

Blok Tuna. Walaupun tidak diakui secara hukum internasional, kehadiran berulang kapal Cina di ZEE Indonesia menimbulkan risiko terbentuknya *acquiescence*, yakni penerimaan diam-diam yang dapat merugikan posisi hukum Indonesia dalam jangka panjang.

Indonesia wajib menjaga yurisdiksi dan hak kedaulatan di ZEE sesuai UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1983. Laut Natuna Utara memiliki nilai strategis tinggi, baik dari aspek ekonomi, pelayaran internasional, maupun pertahanan. Provokasi sistematis dari CCG berpotensi melemahkan posisi diplomatik Indonesia serta menciptakan beban pembuktian yang tidak seimbang.<sup>25</sup> Dalam konteks diplomasi internasional, Indonesia terancam kehilangan kredibilitas jika tidak mampu menunjukkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan wilayah maritimnya.

Karakteristik ancaman *Gray Zone Operations* mencakup ambiguitas hukum, keterlibatan aktor non-militer, dan penggunaan kekuatan koersif di bawah batas konflik terbuka.<sup>26</sup> Strategi ini menghindari simbolisasi militer, tetapi membawa dampak nyata, baik dalam bentuk gangguan ekonomi maupun risiko eskalasi. Cina mengimplementasikan taktik *salami*

*slicing*, yaitu menciptakan perubahan status quo melalui serangkaian langkah kecil namun berkelanjutan.<sup>27</sup> Operasi CCG yang tidak bersifat militer formal mempersulit Indonesia dalam merespons secara tegas, karena langkah keras berisiko ditafsirkan sebagai tindakan provokatif oleh Cina.<sup>28</sup>

Indonesia dihadapkan pada dilema strategis: pembiaran aktivitas CCG dapat mengikis kedaulatan, namun respons militer berisiko meningkatkan eskalasi. Kasus pengerahan TNI AL tahun 2020 untuk menghadapi kapal CCG menunjukkan betapa rentannya kawasan ini terhadap *strategic miscalculation*. Selain itu, tekanan jangka panjang akibat operasi gray zone dapat menyebabkan *strategic fatigue*, yang berdampak pada melemahnya kapasitas respons nasional terhadap ancaman maritim.

Asimetri kekuatan antara Indonesia dan Cina turut memperumit situasi. Berdasarkan *Military Balance 2024* yang diterbitkan IISS, Cina memiliki anggaran pertahanan yang mencapai 219,46 miliar USD, jauh melampaui Indonesia yang hanya 8,80 miliar USD. Dari sisi personel militer, Cina memiliki lima kali lipat kekuatan dibanding Indonesia.<sup>29</sup> Cina juga

<sup>25</sup> Duta, "Pemikiran Kolaboratif Taktis Operasi Dalam Rangka Penguasaan Efektif Zee Di Wilayah Laut Natuna Utara."

<sup>26</sup> Marsetio et al., "The South China Sea Dispute and Regional Maritime Security: Indonesia's Perspective," *International Journal of U- and e- Service, Science and Technology* 10, no. 8 (2017): 111–22, <https://doi.org/10.14257/ijunesst.2017.10.8.1>.

<sup>27</sup> Chan et al., "What US Air Force Re-Optimization Means for Taiwan At the 2024 'Two Sessions' in Beijing, China Talks Tough on Taiwan Decoding Beijing's Gray Zone Tactics: China Coast Guard Activities and the Redefinition of Conflict in the Taiwan Strait The Nexus of Cyb."

<sup>28</sup> Marsetio et al., "The South China Sea Dispute and Regional Maritime Security: Indonesia's Perspective."

<sup>29</sup> The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2024*, *The*

unggul dalam modernisasi alutsista dan pengembangan teknologi strategis seperti rudal balistik dan kapal induk. Sebaliknya, Indonesia masih dalam tahap awal modernisasi, meski telah memulai pengadaan jet tempur Rafale dan F-15 IDN, serta sistem radar modern dari Prancis.

Strategi pertahanan Indonesia berfokus pada pembangunan kekuatan maritim dan penguatan pengawasan wilayah, sejalan dengan visi *Global Maritime Fulcrum*. Namun, keterbatasan fiskal dan ketergantungan pada impor teknologi menjadi tantangan besar. Cina, meskipun menghadapi tekanan ekonomi domestik, tetap berkomitmen pada peningkatan anggaran militer sebagai bagian dari strategi jangka panjangnya, termasuk proyeksi kekuatan global melalui kehadiran militer di luar negeri.

*Gray Zone Operations* yang dijalankan oleh China Coast Guard merupakan ancaman nyata terhadap keamanan nasional Indonesia, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara. Strategi ini menuntut Indonesia untuk meningkatkan kapasitas maritim, memperkuat kerja sama internasional, dan mempertahankan posisi hukum yang tegas berdasarkan UNCLOS 1982. Tanpa respons yang konsisten, strategi ambiguitas Cina dapat terus mengikis kedaulatan Indonesia secara bertahap dan menciptakan risiko konflik di masa depan.

## **Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi *Gray Zone Operations China Coast Guard***

Dalam menghadapi *Gray Zone Operations China Coast Guard*, mustahil bagi Indonesia untuk menghadapi kekuatan China dengan menggunakan *hard power*. Pengerahan militer dalam operasi militer selain perang juga dilakukan pemerintah Indonesia sebagai pendekatan *soft power* atau dalam bentuk diplomasi pertahanan. Pemerintah Indonesia menggunakan *soft power* dengan pendekatan diplomasi seperti membangun hubungan bilateral, komunikasi dan kerjasama. Dalam perkembangannya, Diplomasi pertahanan merupakan langkah strategis untuk menghadapi situasi non-perang untuk meredam eskalasi konflik.<sup>30</sup> Langkah diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan China antara lain pertukaran perwira, kunjungan militer dan latihan militer bersama yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional.

Diplomasi pertahanan sebagai penggunaan militer dan instrumen pertahanan seperti kementerian pertahanan secara kooperatif di masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan.<sup>31</sup> Untuk menghadapi agresivitas *China Coast Guard*, Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi pertahanan sebagai instrumen strategis non-konfrontatif namun tegas. Diplomasi pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai sarana membangun

---

*International Institute for Strategic Studies*, vol. 18, 2024, <https://doi.org/10.1215/15476715-8849520>.

---

<sup>30</sup> Cottey and Forster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*.

<sup>31</sup> Daniel H. Katz, *Defence Diplomacy: Strategic Engagement and Interstate Conflict*, vol. 4, 2020.

kepercayaan (*Confidence Building*) tetapi juga sebagai cara untuk menunjukkan *deterrence* tanpa eskalasi militer terbuka.

Hubungan diplomatik Indonesia–China sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan keamanan. Sejak tahun 1950-an, hubungan kedua negara mengalami dinamika, hingga normalisasi diplomatik terjadi pada 1990.<sup>32</sup> Titik balik hubungan bilateral ini terjadi pada 2005 melalui penandatanganan kemitraan strategis yang mencakup bidang keamanan, perdagangan, investasi, serta teknologi pertahanan.<sup>33</sup> Kemitraan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kerjasama bilateral.

Pada 2006 dan 2007, forum konsultasi pertahanan bilateral diselenggarakan secara bergantian di Jakarta dan Beijing. Hasil penting dari forum tersebut adalah penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) tahun 2007, yang menandai dimulainya kerjasama lebih konkret, termasuk produksi bersama dan alih teknologi pertahanan (ToT). Tujuannya adalah memperkuat kapasitas industri pertahanan nasional dan stabilitas kawasan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Rizal Sukma, "Indonesia-China Relations: The Politics of Reengagement," *Living with China: Regional States and China through Crises and Turning Points*, no. October 1967 (2009): 89–106, <https://doi.org/10.1057/9780230622623>.

<sup>33</sup> Ahmad Naufal Farras, "Hubungan Interdependensi Indonesia-China Di Tengah Ketegangan Laut Natuna Utara," *Indonesian Perspective* 8, no. 1 (2023): 96–120, <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56381>.

<sup>34</sup> Kementerian Pertahanan, "DCA RI - China Nov 2007.Pdf," 2007.

DCA mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kepercayaan strategis dan memperluas kolaborasi pertahanan, seperti pelatihan bersama, pertukaran personel militer, dan pengadaan alutsista. Salah satu implementasi nyata dari DCA adalah penandatanganan MoU antara Kementerian Pertahanan RI dan SASTIND China pada 2011 mengenai alih teknologi rudal dan pengembangan alutsista berbasis kebutuhan TNI.

Kerjasama ini juga memiliki dimensi strategis dalam menghadapi ketegangan geopolitik di Laut China Selatan. DCA memungkinkan dialog militer dan pertukaran intelijen di bidang keamanan maritim, terorisme, dan kejahatan lintas negara, sekaligus memperkuat pertahanan wilayah seperti Natuna. Namun demikian, Indonesia tetap harus mengelola kerjasama ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan dan tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

Penguatan kerjasama ini dikukuhkan melalui ratifikasi DCA dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2016. Ratifikasi ini sesuai dengan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 yang mewajibkan persetujuan DPR untuk perjanjian pertahanan. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam perjanjian internasional strategis. Ruang lingkup kerjasama diperluas mencakup pelatihan militer, pertukaran perwira, dialog pertahanan, serta pengembangan industri dan kapasitas pertahanan sipil. Pasca ratifikasi DCA menjadi

UU No. 6 Tahun 2016, Indonesia dan China mengimplementasikan bentuk kerjasama militer yang meliputi latihan militer bersama (*joint military exercise*) dan pertukaran personel militer. Sebagai instrumen diplomasi pertahanan, kerjasama militer merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas kawasan serta memperluas kapabilitas instrumen pertahanan Indonesia.<sup>35</sup>

Latihan militer bersama merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk mempertahankan posisi bebas-aktifnya di tengah persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Dengan menjalin hubungan militer baik dengan China maupun dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia, Indonesia menegaskan sikap nonbloknnya dalam menghadapi rivalitas geopolitik kawasan. Dalam konteks ini, latihan militer bersama Indonesia–Cina juga dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan antar militer dan membangun mekanisme komunikasi krisis yang lebih efektif.

Implementasi DCA juga diwujudkan melalui program pertukaran perwira dan pelatihan militer, yang mencerminkan aspek penting dari diplomasi pertahanan. Sejumlah perwira TNI dari tiga matra (Darat, Laut, dan Udara) telah dikirim ke lembaga pendidikan militer di Cina, seperti National Defence University diikuti oleh 3 perwira TNI, Army Command College diikuti oleh 3 perwira TNI AD. Navy Command College, diikuti oleh 3 perwira TNI AL. Air Force

Command College, diikuti oleh 1 perwira TNI AU. Armor Junior Command, diikuti oleh 1 perwira TNI AD. Coastal Defence Junior Course, diikuti oleh 2 perwira TNI AL. Coastal Defence Weapon Course, diikuti oleh 2 perwira TNI AL. Submarine Emergency Course, diikuti oleh 2 perwira TNI AL. Surface Ship Junior Course, diikuti oleh 1 perwira TNI AL. Sniper Course, diikuti oleh 1 perwira TNI AD. Chinese Language Course, diikuti oleh 1 bintang TNI AU.<sup>36</sup> Sebaliknya, PLA juga secara rutin mengirimkan perwira untuk mengikuti kursus singkat dan pelatihan taktis di pusat-pusat pelatihan militer di Indonesia, seperti Kodiklat TNI. Pertukaran ini bertujuan memperluas pemahaman budaya militer lintas negara, memperkuat komunikasi personel, serta menjadi basis awal untuk membangun kerja sama lebih lanjut dalam bidang pengembangan teknologi militer dan pertahanan siber. Di tengah era kompleksitas keamanan non-tradisional, pertukaran personel semacam ini juga berfungsi sebagai saluran diplomatik informal yang memperkuat kepercayaan strategis (*strategic trust*) dan mengurangi potensi miskomunikasi antar angkatan bersenjata.

Implementasi *Defence Cooperation Agreement* (DCA) antara Indonesia dan Cina melalui latihan militer bersama dan pertukaran perwira, pada satu sisi, mencerminkan komitmen terhadap hubungan pertahanan yang saling menguntungkan. Namun, dalam

<sup>35</sup> Rene Johannes, "Peningkatan Ketegangan Geopolitik Di Laut China Selatan," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 4 (2023): 211–18.

<sup>36</sup> Kementerian Pertahanan, "Kerjasama Pertahanan RI-RRT," 2024.

konteks meningkatnya aktivitas *gray zone operation* yang dilakukan oleh *China Coast Guard* di perairan Laut Natuna Utara, latihan bersama TNI dan PLA selama ini lebih berfokus pada operasi *non-traditional security*, seperti penanggulangan bencana, operasi SAR, dan bantuan kemanusiaan. Kegiatan ini tidak secara langsung dirancang untuk merespons operasi maritim agresif semacam manuver CCG di wilayah sengketa (*gray zone tactics*) yang sering melibatkan intimidasi terhadap nelayan dan kapal patroli Indonesia. Tetapi, latihan militer bersama memiliki nilai strategis tidak langsung seperti menciptakan saluran komunikasi antara militer-militer yang dapat mereduksi potensi terjadinya eskalasi konflik di Laut Natuna Utara jika terjadi Insiden. Diplomasi pertahanan dalam bentuk latihan bersama menciptakan *security reassurance*, tetapi tidak cukup efektif jika tidak dibarengi dengan kebijakan pertahanan maritim yang lebih ofensif secara defensif.<sup>37</sup>

Pertukaran perwira Indonesia dan China berfokus pada pendidikan militer, pengenalan strategi nasional masing-masing negara, dan pembentukan hubungan interpersonal jangka panjang antara pejabat militer. Dalam konteks untuk menghadapi *Gray Zone Operation* CCG, pertukaran perwira Meningkatkan pemahaman tentang pola pikir militer Cina, termasuk *strategic culture* yang digunakan dalam operasi tekanan non-konvensional seperti yang dijalankan

<sup>37</sup> Adikara and Munandar, "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara."

oleh CCG, Membangun kepercayaan strategis (*strategic trust*) yang dapat mencegah miskalkulasi militer dalam situasi ketegangan di laut, Menjadi wadah diplomasi informal untuk menyuarakan keberatan Indonesia atas pelanggaran ZEE secara lebih personal, terutama jika komunikasi formal tidak membuahkan hasil.<sup>38</sup> Namun, pertukaran ini tetap terbatas karena tidak menyentuh sektor keamanan maritim sipil seperti coast guard atau aparat penegak hukum laut (*law enforcement*), yang justru menjadi aktor utama dalam menghadapi CCG.

Operasi *gray zone* oleh CCG merupakan tindakan *below the threshold*, yaitu tidak masuk kategori agresi militer terbuka, namun bersifat koersif dan provokatif.<sup>39</sup> Dalam hal ini, latihan militer dan pertukaran perwira tidak dirancang untuk melibatkan aspek coast guard atau maritim sipil, sehingga tidak menyentuh akar persoalan langsung di Laut Natuna Utara. China memisahkan antara kerja sama militer dengan aktivitas maritimnya, sehingga meskipun hubungan TNI-PLA membaik, CCG tetap melakukan manuver yang melanggar hukum laut internasional.<sup>40</sup> Hal ini menunjukkan adanya *compartmentalization* dalam strategi

<sup>38</sup> Andrew Cottey and Anthony Forster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, 2013, <https://doi.org/10.4324/9781315000817>.

<sup>39</sup> Todd C Helmus et al., *Understanding and Countering China 's Maritime Gray Zone Operations*, 2024.

<sup>40</sup> Anugerah, "Penguatan Strategi Penangkalan Dalam Merespons Aksi Koersif Cina Di Laut Natuna Utara."

Cina yaitu kerja sama militer berjalan, sementara tekanan di laut terus berlanjut.

Diplomasi angkatan laut atau *Naval Diplomasi* merupakan penggunaan kekuatan angkatan laut untuk mencapai tujuan politik dan keamanan melalui cara-cara non-konfrontatif.<sup>41</sup> *Joint statement on strength comprehensive strategic partnership between the people's republic of China and Republic Indonesia* pada tahun 2015 mencetuskan kerjasama antara Indonesia dan China dalam bidang pertahanan dan keamanan maritim sudah berjalan cukup lama dalam bentuk diplomasi angkatan laut. Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara menyepakati dibentuknya forum *Navy to Navy Talk* sebagai forum dialog kerjasama pertahanan angkatan laut.<sup>42</sup>

Kerjasama militer angkatan laut antara Indonesia dan China ini bertujuan untuk menciptakan keamanan maritim.<sup>43</sup> *Naval*

diplomacy didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan angkatan laut untuk mencapai tujuan politik dan keamanan melalui cara-cara non-konfrontatif.<sup>44</sup> Konsep ini mencakup tiga fungsi utama yaitu:

1. Fungsi Militer: Proyeksi kekuatan dan operasi pertahanan.
2. Fungsi Polisionil: Penegakan hukum maritim, seperti pemberantasan illegal fishing.
3. Fungsi Diplomatik: Pembangunan hubungan bilateral melalui kunjungan kapal, latihan bersama, dan dialog strategis.

Meningkatnya potensi ancaman di wilayah Laut Natuna Utara, memerlukan integritas dan integrasi bagi instrumen pertahanan negara untuk mendukung upaya nasional dalam menjaga sumber daya kelautan. Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin *freedom of navigation* dan *safety of navigation* pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bagi kepentingan kapal-kapal baik kepentingan kapal-kapal baik domestik maupun internasional. Dalam konteks ini, pada jalur navigasi sepanjang ALKI, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mendapat tugas dan tanggung jawab pada tiga peran sekaligus, yaitu Peran Militer, Peran Polisionil, dan Peran Diplomasi yang diwujudkan dengan menggelar Operasi Pengamanan ALKI I.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Ken Booth, "Navies and Foreign Policy," *Sea Power Centre Australia*, 1977.

<sup>42</sup> Eko Hadi Suwarno, Bambang Irwanto, and Didi Efendi, "Implementasi Navy To Navy Cooperation Talk Antara Tentara Nasional Indonesia Dengan China Guna Menjaga Stabilitas Maritim Indonesia Melalui Hubungan Diplomasi Pertahanan," *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 8 (2024): 8493–98, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5767>.

<sup>43</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Joint Statement Between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future," 2024, <https://kemlu.go.id/daftar-joint-statement/joint-statement-between-the-peoples-republic-of-china-and-the-republic-of-indonesia-on-advancing-the-comprehensive-strategic-partnership-and-->

---

[the-china-indonesia-community-with-a-shared-future?type=publication](https://kemlu.go.id/daftar-joint-statement/joint-statement-between-the-peoples-republic-of-china-and-the-republic-of-indonesia-on-advancing-the-comprehensive-strategic-partnership-and--the-china-indonesia-community-with-a-shared-future?type=publication).

<sup>44</sup> Ken Booth, "Navies and Foreign Policy," *Sea Power Centre Australia*, 1977.

<sup>45</sup> Saryanto, "Strategi Interoperabilitas TNI AL Dan BAKAMLA RI Dalam Menghadapi Intrusi Kapal China Coast Guard Di Laut

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai instansi militer di bidang laut, TNI AL memiliki tugas penting dalam mempertahankan kedaulatan laut Indonesia yaitu menjaga seluruh wilayah perairan Indonesia. Selain itu, TNI AL juga memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (constabulary function). Fungsi ini berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. TNI AL tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengadilan.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya pada Pasal 9 yang menyebutkan bahwa Angkatan Laut bertugas untuk melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, melaksanakan pemberdayaan

wilayah pertahanan laut. Poin mengenai tugas diplomasi Angkatan Laut (naval diplomacy) adalah fungsi diplomasi sesuai kebijakan politik luar negeri yang melekat pada peran Angkatan Laut secara universal sesuai dengan kebiasaan Internasional, serta sudah menjadi sifat dasar dari setiap kapal perang suatu negara yang berada di negara lain memiliki kekebalan diplomatik dan kedaulatan penuh.

Booth menekankan enam aspek analitis naval diplomacy yaitu kuasa dan pengaruh, aktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi, aset dan keterbatasan, taktik operasional, serta efek jangka panjang.<sup>46</sup> Dalam konteks Indonesia - China, diplomasi angkatan laut dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan (*trust-building*), menyelesaikan sengketa maritim secara damai, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator di kawasan Natuna Utara. Sebagai implementasi dari DCA antara Pemerintah Republik Rakyat China dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani pada tahun 2007, Tentara Pembebasan Rakyat China Angkatan Laut / *People's Liberation Army Navy* (PLA Navy) dan TNI AL secara aktif melakukan forum bilateral dalam bentuk *Navy to Navy Talks* (NTNT). Sebagai bagian dari hubungan bilateral, PLA Navy dan TNI AL telah sepakat untuk melaksanakan NTNT secara rutin.

Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memperkuat dialog kebijakan dan komunikasi antara kedua Angkatan Laut, meningkatkan saling percaya, meningkatkan

---

Natuna Utara,” *Jurnal Otoranpur* 3 (2022): 2022.

---

<sup>46</sup> Booth, “Navies and Foreign Policy.”

praktek kerjasama, dan bersama-sama meningkatkan kemampuan Angkatan Laut.<sup>47</sup> Berdasarkan Staf Operasi Angkatan Laut TNI AL, pada pertemuan *Senior Official Meeting* (SOM) 2+2 antara TNI AL dan PLA Navy, forum *Navy To Navy Talk* (NTNT) merupakan wadah untuk saling berkomunikasi dalam meningkatkan hubungan diplomasi antara Navy kedua negara. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, kegiatan kelima pernah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021, namun karena terkendala Covid-19 mengakibatkan rencana ini batal untuk dilaksanakan dan sempat terhenti sampai dengan sekarang.<sup>48</sup>

NTNT terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 20 September 2019 di Anvaya Hotel, Kuta, Bali, dari hasil minute berhasil menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk saling melengkapi inisiatif komunitas maritim masa depan bersama dan strategi poros maritim dunia. Kedua pihak berdasarkan mekanisme memerlukan penguatan komunikasi kebijakan, kerja sama praktis dan berbagi hasil untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan Angkatan Laut kedua negara.

- b. Kedua belah pihak sepakat bahwa negara-negara di kawasan Laut China Selatan sedang menghadapi tantangan keamanan regional yang kompleks, yang perlu ditangani melalui kerja sama secara bilateral dan multilateral. TNI AL memberikan gambaran tentang tantangan keamanan maritim di Kawasan dan solusinya. Sedangkan PLA Navy membahas posisi China terkait permasalahan di Laut China Selatan dan *Freedom of Navigation* serta menyarankan dalam penyelesaian masalah melalui dialog langsung dan konsultasi.
- c. Kedua pihak membahas tentang kemungkinan kerjasama penyelamatan kapal selam di masa depan. TNI AL menyarankan kedua belah pihak dapat membicarakan hal-hal teknis terlebih dahulu dan bertukar pandangan tentang pertemuan NTNCT berikutnya.
- d. TNI AL meminta adanya pertukaran informasi terkait dengan *illegal vessel interest*, dan PLA Navy setuju untuk melaporkan proposal tersebut kepada departemen terkait.
- e. Kedua belah pihak telah sepakat untuk lebih memperkuat kunjungan kapal perang diantara kedua Angkatan Laut.
- f. PLA Navy menawarkan untuk menjajaki kemungkinan pelaksanaan latihan bilateral. TNI AL akan mempertimbangkan proposal tersebut dan akan

---

<sup>47</sup> Suwarno, Irwanto, and Efendi, "Implementasi Navy To Navy Cooperation Talk Antara Tentara Nasional Indonesia Dengan China Guna Menjaga Stabilitas Maritim Indonesia Melalui Hubungan Diplomasi Pertahanan."

<sup>48</sup> Staf Operasi Angkatan Laut TNI AL, "Sopsal - Pointers SOM 2+2 RI-CHINA TA 2024," 2024.

- melaporkannya terlebih dahulu kepada pimpinan.
- g. Kedua Angkatan Laut sepakat untuk melakukan *Passex* dalam setiap kesempatan kapal PLA Navy yang mengunjungi Indonesia dan sebaliknya.
  - h. TNI AL akan mengundang PLA Navy untuk berpartisipasi dalam *Multilateral Naval Exercise* (MNE) Komodo dan *International Fleet Review*.
  - i. TNI AL mengundang PLA Navy untuk mengirimkan perwakilan pada pendidikan Seskoal dan Kursus Hidrografi yang didahului oleh Kursus Bahasa Indonesia, dan sebaliknya TNI AL meminta kursus bahasa Mandarin di China.
  - j. TNI AL menawarkan PLA Navy untuk bergabung pada *leg* pertama pelayaran KRI Bima Suci dalam rangka kegiatan *International Cadet Sail 2020*. dan sampai saat ini masih berjalan. Dua kadet dan satu perwira pendamping PLA Navy mengikuti pelayaran KRI Bima Suci pada kegiatan APCS 2024 dengan rute Surabaya-Jakarta-Singapura, dari tanggal 30 Juli s.d 10 Agustus 2024.
  - k. TNI AL mengusulkan kegiatan *Officer Exchange Programme* yang terdiri dari 4 s.d. 5 perwira.
  - l. Kedua pihak sepakat meningkatkan kunjungan pejabat tinggi. PLA Navy akan mengundang Kasal untuk berkunjung ke China.
  - m. PLA Navy menawarkan kerja sama di bidang industri militer di antara kedua Angkatan Laut. TNI AL akan menyampaikan proposal ini kepada Kementerian Pertahanan.

Dalam konteks menghadapi *Gray Zone Operations China Coast Guard*, NTNT dapat menjadi instrumen preventif terhadap eskalasi *Gray Zone Operations*. NTNT dapat berfungsi sebagai kanal diplomasi militer yang dapat memungkinkan terbangunnya sistem komunikasi strategis antara TNI AL dengan PLA Navy. Pertemuan tahunan dan saluran komunikasi formal antar komando menjadi mekanisme pencegahan dini (*early warning*) dan *de-escalation* atas kemungkinan salah persepsi atau insiden maritim yang disebabkan oleh aktor-aktor paramiliter seperti CCG.<sup>49</sup> Meskipun secara administratif CCG diklasifikasikan sebagai lembaga penegakan hukum sipil, secara *de facto* menjalankan fungsi keamanan maritim yang berada di bawah kendali komando pusat negara. Ini menempatkan CCG sebagai aktor quasi-militer, yang dalam banyak kasus bertindak secara ofensif di wilayah yang diklaim oleh Cina berdasarkan batas *nine-dash line*, termasuk di ZEE Indonesia. Dalam situasi tersebut, NTNT menyediakan kerangka kerja pembangunan kepercayaan militer (*military confidence-building measures*) yang

<sup>49</sup> Fendi Irawan and Indra Kusumawardhana, "Diplomasi Angkatan Laut Indonesia-Cina: Studi Kasus Implementasi Forum NTNCT (Navy to Navy Cooperation Talk) Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Maritim Indonesia," *Sosio Dialektika* 8, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.31942/sd.v8i1.8306>.

krusial untuk menghindari konflik terbuka. Meskipun kerja sama ini belum memasukkan dimensi penegakan hukum laut atau koordinasi antara TNI AL dan CCG secara langsung, eksistensinya tetap relevan sebagai kanal komunikasi terbatas dalam merespons manuver CCG yang berpotensi memicu interaksi intensif dengan unsur pertahanan Indonesia.

Hubungan diplomatis dan strategis Indonesia – China dalam kurun dua tahun terakhir memberikan perkembangan yang sangat menguntungkan bagi kedua negara. Berdasarkan laporan perkembangan situasi China dan Hubungan Indonesia China Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, pada tanggal 13 Agustus 2024 Indonesia dan China memperkuat kemitraan strategis komprehensif yang mencakup sektor politik, ekonomi, dan pertahanan. Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang, Pada tanggal 24 Oktober 2024 Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, bertemu dengan Duta Besar China, Wang Lutong, untuk membahas penguatan hubungan pertahanan dan keamanan, Pada bulan Januari 2025 Indonesia menyatakan komitmen untuk memperluas kemitraan pertahanan dengan China dalam hal keamanan maritim dan jalur pelayaran internasional.<sup>50</sup>

Hubungan diplomatis yang baik antara Indonesia dengan China

memberikan peluang kerjasama dalam bentuk hibah bagi Indonesia. Indonesia mengirimkan proposal permohonan kepada pemerintah China untuk pengadaan kendaraan motor pengawalan 650 cc sebanyak 400 Unit, *Vehicle Chassis Inspection Robot* sebanyak 40 unit dengan Rencana Distribusi Kemhan RI, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU di Ruang Rapat Lantai 6 Gedung D.I. Panjaitan Ditjen Kuathan Kemhan Jalan Tanah Abang Timur No.7 Jakarta Pusat turut hadir Pejabat Kemhan, Pejabat UO Mabes TNI, Pejabat UO TNI AD, Pejabat UO TNI AL, Pejabat UO TNI AU, Athan China di Jakarta.<sup>51</sup>

Selain hibah dalam bentuk barang, pada 14 Januari 2024 Indonesia juga mendapat tawaran dalam bentuk hibah 50 juta RMB (110 Miliar Rupiah) dari Pemerintah Cina untuk peralatan militer.<sup>52</sup> Sebelumnya pada tahun 2019 Indonesia mendapat hibah berupa alat kesehatan senilai 10 juta RMB (21 Miliar Rupiah) saat pandemi Covid-19 dan pada Tahun 2022 mendapat hibah alat pengamanan senilai 80 juta RMB (173 Miliar Rupiah) untuk keperluan Indonesia menjadi tuan rumah G-20.

Hibah yang diberikan oleh pemerintah China memiliki tujuan tertentu untuk negaranya. Berdasarkan dokumen dari Kementerian pertahanan, China bertujuan untuk menempatkan proyek strategis di Indonesia seperti

---

<sup>50</sup> Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "LAPORAN PERKEMBANGAN SITUASI CHINA DAN HUBUNGAN INDONESIA-CHINA," 2025.

---

<sup>51</sup> Kementerian Pertahanan, "Grant Proposal from the Indonesian Ministry of Defence to Chinese Government.," 2024.

<sup>52</sup> Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan RI, "Pembahasan Tawaran Bantuan Militer Kemhan RRT," 2024.

industri mobil listrik dan ekosistemnya serta hilirisasi industri, Investasi dalam kerangka sinergi GMF-BRI, di 4 koridor ekonomi (Regional Comprehensive Economic Corridors) dan non-koridor. Investasi Industri 4.0 dan 5 destinasi super prioritas (Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, Danau Toba, dan Borobudur). Investasi bagi pengembangan industri mobil listrik beserta ekosistemnya. Investasi di bidang telekomunikasi dan semi konduktor, termasuk dengan membangun R&D Center di Indonesia serta perluasan pembangunan proyek kereta cepat.<sup>53</sup>

Selain itu, hibah ini bertujuan untuk Dukungan terhadap *Belt and Road Initiative* dan proyek-proyek BRI di Indonesia (Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung) maupun inisiatif RRT lainnya seperti Global Development Initiative (GDI), Global Security Initiative (GSI), dan Global Civilization Initiative (GCI). Penguatan kerja sama perdagangan dan investasi, Dukungan bagi penguatan ASEAN- RRT. Dukungan RI terkait isu Xinjiang Uighur, Laut China Selatan, Hong Kong, Tibet, Falun Gong, Dukungan RI terkait One China Policy dan Dukungan terkait pencalonan pada OI.<sup>54</sup>

Hibah yang diberikan oleh pemerintah China kepada Indonesia dapat menjadi ancaman maupun dukungan tersendiri bagi Indonesia terutama dalam konteks menghadapi *China Coast Guard* di Laut Natuna Utara. Hibah dapat menjadi realisasi hubungan diplomatik yang baik dengan China sehingga pendekatan

pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi berkemungkinan untuk mudah dilakukan. Disisi lain, hibah dapat beresiko karena dapat memunculkan potensi dilema strategis, apakah Indonesia akan canggung bersikap keras terhadap *China Coast Guard* saat peralatan militernya bersumber dari Beijing. Penerimaan hibah bisa dimaknai sebagai sinyal politik lunak (*soft alignment*), yang berpotensi melemahkan posisi Indonesia di forum ASEAN terkait Laut China Selatan.

### C. KESIMPULAN

*Gray Zone Operations* yang dilakukan oleh China Coast Guard (CCG) di Laut Natuna Utara telah menghadirkan tantangan kompleks bagi kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Melalui pendekatan non-militer namun agresif, tindakan tersebut mengaburkan batas antara perang dan damai, menjadikannya ancaman yang bersifat ambigu dan sulit untuk dihadapi dengan instrumen konvensional. Diplomasi Pertahanan Indonesia berperan dalam merespons operasi-operasi tersebut, dengan fokus pada strategi, instrumen kebijakan, serta efektivitas pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertahanan dan TNI. *Gray Zone Operations China Coast Guard* merupakan bentuk ancaman non-konvensional yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan geopolitik tanpa menimbulkan konflik bersenjata terbuka. Operasi ini bersifat ambigu, berlangsung secara berkelanjutan, dan dilakukan di bawah ambang batas perang. China Coast Guard, sebagai

<sup>53</sup> Pertahanan, "Kerjasama Pertahanan RI-RRT."

<sup>54</sup> *Ibid.*

instrumen sipil-militer pemerintah Cina, melakukan pendekatan ini untuk menegaskan klaim sepihak atas wilayah Laut Natuna Utara yang masuk dalam *nine-dash line*, meskipun klaim tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016.

*Gray Zone Operations* CCG di Laut Natuna Utara dilakukan dengan taktik intimidasi, pemaksaan, dan pelanggaran kedaulatan wilayah perairan Indonesia secara terus-menerus. Aktivitas mereka meliputi pelayaran ilegal, pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), pendampingan kapal nelayan Cina secara sistematis, serta penolakan terhadap kehadiran aparat Indonesia. Hal ini membentuk ancaman multidimensi bagi Indonesia, mulai dari pelanggaran hukum internasional, gangguan stabilitas keamanan regional, hingga kerugian ekonomi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam menjaga kedaulatan. Karakteristik ancaman gray zone yang dilakukan oleh CCG terhadap Indonesia mencakup beberapa aspek strategis. Pertama adalah penggunaan aktor non-militer negara yang memiliki kapasitas semi-militer, seperti CCG yang sejak 2018 secara organisatoris berada di bawah Komisi Militer Pusat Cina. Dengan demikian, walau secara formal CCG adalah lembaga penegak hukum maritim, secara struktural dan operasional mereka merupakan bagian dari strategi pertahanan maritim Cina.

Penekanan pada pendekatan *soft power* melalui diplomasi pertahanan bilateral antara Indonesia

dan Cina. Dalam konteks ini, Indonesia tidak mengandalkan *hard power* militer secara langsung, melainkan menggunakan instrumen diplomasi pertahanan yang meliputi memperkuat hubungan bilateral, komunikasi, dan kerjasama strategis untuk meredam potensi eskalasi konflik di wilayah Laut Natuna Utara yang menjadi kawasan sengketa. Kerangka utama diplomasi pertahanan ini tercermin dalam Defence Cooperation Agreement (DCA) yang ditandatangani pada tahun 2007 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2016. DCA menjadi payung hukum formal yang mengatur kerjasama pertahanan antara kedua negara, termasuk pertukaran perwira, latihan militer bersama, pengembangan industri pertahanan, dan transfer teknologi. Kesepakatan ini juga mencakup pertukaran informasi intelijen di bidang keamanan maritim, terorisme, dan kejahatan lintas negara, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya sekaligus menjaga prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif.

Latihan militer bersama dan pertukaran personil militer yang dilaksanakan pasca ratifikasi DCA berfokus pada operasi keamanan non-tradisional seperti penanggulangan bencana, operasi SAR, dan bantuan kemanusiaan, sehingga belum secara langsung mengantisipasi taktik *gray zone* yang bersifat koersif dan provokatif oleh CCG. Namun, latihan ini memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan (*confidence building*) dan menciptakan mekanisme komunikasi krisis yang dapat mereduksi risiko eskalasi militer

terbuka. Pertukaran perwira juga berfungsi sebagai saluran diplomasi informal yang memperkuat strategic trust dan memperluas pemahaman budaya serta strategi militer masing-masing negara.

Diplomasi angkatan laut (*naval diplomacy*) melalui forum *Navy to Navy Talk* menjadi instrumen non-konfrontatif untuk memperkuat kerjasama pertahanan maritim, dengan tujuan utama menciptakan keamanan maritim melalui fungsi militer, polisionil, dan diplomatik. Meski demikian, terdapat compartmentalization dalam strategi Cina yang memisahkan kerja sama militer dengan aktivitas koersif CCG di laut, sehingga tekanan maritim oleh CCG tetap berlanjut meskipun hubungan militer bilateral membaik. Secara keseluruhan, diplomasi pertahanan Indonesia dengan Cina merupakan strategi adaptif yang mengedepankan dialog, kerjasama, dan pembangunan kepercayaan sebagai instrumen utama menghadapi operasi gray zone. Namun, efektivitas diplomasi ini perlu didukung dengan kebijakan pertahanan maritim yang lebih tegas dan responsif terhadap ancaman non-konvensional demi menjaga kedaulatan dan stabilitas regional secara berkelanjutan.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, Ahmad Pradipta Budhihatma, and Adis Imam Munandar. "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara." *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (2021): 83–101. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>.
- Agastia, IGB Dharma. "Centre for Strategic and International Studies Report Part Title : Menghadapi Milisi Maritim Tiongkok Dan Operasi Daerah Abu-Abu ( Grey Zone Operations ) Di Laut Cina Selatan Report Part Author ( s ) : IGB Dharma Agastia Report Title : Sorotan Kebijakan Lu," 2020.
- AL, Staf Operasi Angkatan Laut TNI. "Sopsal - Pointers SOM 2+2 RI-CHINA TA 2024," 2024.
- Anugerah, Boy. "Penguatan Strategi Penangkalan Dalam Merespons Aksi Koersif Cina Di Laut Natuna Utara." *Jurnal Dinamika Global* 6, no. 02 (2021): 286–307. <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.701>.
- Booth, Ken. "Navies and Foreign Policy." *Sea Power Centre Australia*, 1977.
- Burgess, Stephen. "Confronting China's Maritime Expansion in the South China Sea A Collective Action Problem." *Journal of Indo-Pacific Affairs*, no. Fall (2020): 112–34.
- Chan, Eric, Amrita Jash, Sze-Fung Lee, Enescan Lorci, and Marshall Reid. "What US Air Force Re-Optimization Means for Taiwan At the 2024 'Two Sessions' in Beijing, China Talks Tough on Taiwan Decoding Beijing's Gray Zone Tactics: China Coast Guard Activities and the Redefinition of Conflict in the Taiwan Strait The Nexus of Cyb" 9, no. 6 (2024). <http://globaltaiwan.org/sub->
- Cottey, Andrew, and Anthony

- Forster. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance. Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, 2013.  
<https://doi.org/10.4324/9781315000817>.
- Creswell, John W. *A Concise Introduction to Mixed Methods Research Second Edition*, 2022.
- Defense, Japanese Ministry of. "The Coast Guard Law of the People's Republic of China," 2020.  
[https://www.mod.go.jp/en/d\\_act/sec\\_env/ch\\_ocn/index.html](https://www.mod.go.jp/en/d_act/sec_env/ch_ocn/index.html).
- Desierto, D. "China's Maritime Law Enforcement Activities in the South China Sea." *International Law Studies* 96, no. 1 (2020): 269.
- Duta, D R. "Pemikiran Kolaboratif Taktis Operasi Dalam Rangka Penguasaan Efektif Zeei Di Wilayah Laut Natuna Utara." *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime ...)*, 2022, 111–17.  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3116966>.
- Farras, Ahmad Naufal. "Hubungan Interdependensi Indonesia-China Di Tengah Ketegangan Laut Natuna Utara." *Indonesian Perspective* 8, no. 1 (2023): 96–120.  
<https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56381>.
- Helmus, Todd C, Krista Romita Grocholski, Tyler Liggett, Ashley L Rhoades, Scott Savitz, and Keytin Palmer. *Understanding and Countering China's Maritime Gray Zone Operations*, 2024.
- Hongbin, Ding, and Ihsan Ullah. "The South China Sea's Nine Dash Line: Key Disputes and China's Historical Rights Claims." *Journal of Pakistan-China Studies (JPCS)* 3, no. 1 (2022): 67–86.  
<https://doi.org/10.55733/jpcs.v3i1.53>.
- Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik. "Klaim Peta Baru China Tabrak Batas Sejumlah Negara, Kedaulatan Indonesia Terancam?," 2023.  
<https://bnpp.go.id/berita/klaim-peta-baru-china-tabrak-batas-sejumlah-negara-kedaulatan-indonesia-terancam>.
- Indonesia, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik. "LAPORAN PERKEMBANGAN SITUASI CHINA DAN HUBUNGAN INDONESIA-CHINA," 2025.
- Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik. "Joint Statement Between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future," 2024.  
<https://kemlu.go.id/daftar-joint-statement/joint-statement-between-the-peoples-republic-of-china-and-the-republic-of-indonesia-on-advancing-the-comprehensive-strategic-partnership-and--the-china-indonesia-community-with-a-shared-future?type=publication>.
- Indonesian Ocean Justice Initiative. "Laporan Deteksi & Analisis Keamanan Laut," 2024.
- Irawan, Fendi, and Indra Kusumawardhana. "Diplomasi Angkatan Laut Indonesia-Cina:

- Studi Kasus Implementasi Forum NTNCT (Navy to Navy Cooperation Talk) Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Maritim Indonesia.” *Sosio Dialektika* 8, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.31942/sd.v8i1.8306>.
- Johannes, Rene. “Peningkatan Ketegangan Geopolitik Di Laut China Selatan.” *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 4 (2023): 211–18.
- Journal, K M I International, and Maritime Affairs. “KMI International Journal of Maritime Affairs and Fisheries” 4, no. 1 (2012).
- Kane, TM. *Chinese Grand Strategy and Maritime Power. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SYSTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Kim, Suk Kyoan. “An International Law Perspective on the China Coast Guard Law and Its Implications for Maritime Security in East Asia.” *International Journal of Marine and Coastal Law* 37, no. 2 (2022): 241–55. <https://doi.org/10.1163/15718085-bja10089>.
- Marsetio, Amarulla Octavian, . Rudiyanto, Janet Dyah Ekawati Gibson, Kazan Gunawan, and Rajab Ritonga. “The South China Sea Dispute and Regional Maritime Security: Indonesia’s Perspective.” *International Journal of U- and e- Service, Science and Technology* 10, no. 8 (2017): 111–22. <https://doi.org/10.14257/ijunesst.2017.10.8.11>.
- Pertahanan, Kementerian. “Grant Proposal from the Indonesian Ministry of Defence to Chinese Government.,” 2024.
- . “Kerjasama Pertahanan RI-RRT,” 2024.
- Pertahanan, Kementrian. “DCA RI - China Nov 2007.Pdf,” 2007.
- RI, Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan. “Pembahasan Tawaran Bantuan Militer Kemhan RRT,” 2024.
- Rizal Dwi Novianto, Dkk. “PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA Rizal Dwi Novianto.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3, no. Nomor 1 (2020): Hal 69-78.
- Saryanto. “Strategi Interoperabilitas TNI AL Dan BAKAMLA RI Dalam Menghadapi Intrusi Kapal China Coast Guard Di Laut Natuna Utara.” *Jurnal Otoranpur* 3 (2022): 2022.
- Simanjuntak, Mangisi. “Menolak Klaim Historis China ‘Nine Dash Line’ Dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan Serta Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 150–62. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.466>.
- Studies, The International Institute for Strategic. *The Military Balance 2024. The International Institute for Strategic Studies*.

- Vol. 18, 2024.  
<https://doi.org/10.1215/15476715-8849520>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013.
- Sukma, Rizal. "Indonesia-China Relations: The Politics of Reengagement." *Living with China: Regional States and China through Crises and Turning Points*, no. October 1967 (2009): 89–106.  
<https://doi.org/10.1057/9780230622623>.
- Sulistiyani, Yuli Ari, Andhini Citra Pertiwi, and Marina Ika Sari. "Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration [Respons Indonesia Di Tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan Di Bawah Pemerintahan Jokowi]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 12, no. 1 (2021): 85–103.  
<https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>.
- Suwarno, Eko Hadi, Bambang Irwanto, and Didi Efendi. "Implementasi Navy To Navy Cooperation Talk Antara Tentara Nasional Indonesia Dengan China Guna Menjaga Stabilitas Maritim Indonesia Melalui Hubungan Diplomasi Pertahanan." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 8 (2024): 8493–98.  
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5767>.
- Syahrial, Damar Dwi. "Diplomacy in Countering Terrorism : An Analysis of Indonesia-Australia Bilateral Consultations on Combating Terrorism," 2024, 477–93.
- To Nguyen, Hong Kong. "Law and (Dis) Order in the South China Sea: Analyzing Maritime Law-Enforcement Activities in 2010–22." *Asia Policy* 18, no. 2 (2023): 127–64.
- Waluyo, Bambang Dwi. "Cina Dan Vietnam: Ketiadaan Konflik Terbuka Di Laut Cina Selatan." *Jurnal Dinamika Global* 5, no. 02 (2020): 319–33.  
<https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.203>.